

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang terus menggalakkan pembangunan di segala bidang kehidupan dengan tujuan mengejar ketertinggalan dari negara lain dan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil dan sejahtera bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menyukseskan pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan dana yang cukup besar. Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan tersebut berasal dari berbagai sumber, salah satunya berasal dari partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak. Sekarang pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling diandalkan. Hingga saat ini, penerimaan negara dari sektor perpajakan mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan negara. Kedepan kontribusi penerimaan pajak diharapkan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan negara serta untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang dicanangkan pemerintah (Yosifin, 2013:10).

Usaha yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan cara menggali sumber-sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak dan retribusi daerah yang telah menjadi sumber penerimaan yang dapat

diandalkan bagi daerah. Pada saat ini, sektor perpajakan memegang peran penting sebagai sumber penerimaan utama negara, baik untuk penerimaan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini sebagai aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah (BUMD), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 juga menjelaskan tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pendapatan Daerah, yang berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana pajak daerah terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota terdiri dari:

1. Pajak Provinsi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Permukaan

i. Pajak Sarang Burung Walet

j. Pajak Bumi dan Bangunan

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan jenis Pajak Daerah di atas, yang menjadi pembahasan adalah Pajak Hiburan, dimana pajak hiburan sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah, maka dalam menyelenggarakan Pajak Hiburan tersebut Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah harus mengawasi proses pelaksanaan Pajak Hiburan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No 10 tahun 2010, disebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah mempunyai peranan yang sangat besar dalam menyelenggarakan Pajak Hiburan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam melaksanakan Pajak Hiburan tersebut Pemerintah tentunya mendapat permasalahan. Oleh karena itu, petugas yang berwenang dalam pelaksanaan pajak hiburan ini harus meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang timbul. Apabila permasalahan tersebut dapat diatasi, tentunya akan meningkatkan penerimaan daerah, sehingga dapat membiayai pembangunan daerah. Banyaknya tugas yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan dalam mengelola pajak hiburan ini tentunya bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah, karena itu mahasiswa merasa perlu untuk mengetahui lebih dalam apa saja yang harus dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan dalam mengelola Pajak Hiburan. Hal

inilah yang menjadikan penulis memilih Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan sebagai tempat studi lapang dengan judul “
MEKANISME PENGENAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PACITAN ”

1.2 Tujuan Studi Lapang

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam studi lapang ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengenaan dan pemungutan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Manfaat studi lapang ini bagi penulis adalah agar lebih meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan, keterampilan, pemahaman, serta kinerja praktik mahasiswa dalam mekanisme pengenaan dan pemungutan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan secara benar dan tepat, serta bagi pembaca dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan secara umum tentang pajak hiburan.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Ruang lingkup adalah suatu batasan yang memudahkan penulis dalam melakukan studi lapang agar lebih efektif, efisien, tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas dan dengan berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dibahas. Ruang lingkup masalah yang akan dikaji adalah mekanisme pengenaan dan pemungutan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan.

1.5 Metode Pengumpulan Data

1. Pengamatan (*Observation Guide*), yaitu penulis melakukan kegiatan mengumpulkan dan mencari data dengan cara terjun ke lapangan untuk melakukan peninjauan dengan mengamati, mendengar dan membantu mengerjakan tugas yang diberikan oleh pihak instansi yang berhubungan dengan Wajib Pajak dan jenis usaha yang dikenai Pajak Hiburan di Kabupaten Pacitan.
2. Wawancara (*Interview Guide*), melalui metode ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepala Bidang Penataan dan Penetapan yaitu Bapak Marsandi, SH.M.Si yang berkaitan dengan potensi pajak hiburan yang ada di Kabupaten Pacitan.
3. Dokumentasi (*Optional Guide*), yaitu pengumpulan daftar-daftar dokumentasi yang diperlukan dalam laporan tugas akhir. Dokumen tersebut berupa Peraturan Bupati Pacitan, data pegawai yang ada di Badan Pendapatan Kabupaten Pacitan, Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Kabupaten Pacitan serta Data Realisasi dan Target PAD Kabupaten Pacitan dari tahun 2014-2016.